BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor : 480 / 159 / 2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23) ;
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 489.1 / 238 / 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor : 480 / 159 / 2021
Tanggal : 17 Maret 2021

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J; - TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	5 Tahun	- Mengungkap rahasia pribadi	- Melindung data pribadi dan menjaga kondusivitas

1	2	3	4	5	6
2	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	5 Tahun	- Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasikan	- Kerahasiaan lokasi terjaga
3	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan 2	5 Tahun	- Menghambat proses penegakan hukum - Mengganggu kepentingan kekayaan intelektual - Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	- Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat - Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi

1	2	3	4	5	6
	- Surat pencairan anggaran b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelom pok/perseorangan c. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat				- Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
	d. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan				
4	Disposisi surat pimpinan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;		- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Data Pribadi Penduduk	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	1 tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang.
6	Rincian hasil uji kompetensi PNS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	1 Tahun	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

1	2	3	4	5	6
7	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
9	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
12	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
13	Dokumen hasil sidang Baperjakat(notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - seorang PNS Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/mengha mbat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat mengganggu proses - penyusunan kebijakan/mengha mbat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
15	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
18	Hasil Identifikasi potensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS
19	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20	Soal Tes CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis selesksi CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS

1	2	3	4	5	6
22	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS
23	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang seorang PNS
24	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

1	2	3	4	5	6
26	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
28	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
29	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	5 Tahun	- Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	- Terlindunginya keamanan pejabat daerah secara kedinasan
30	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum
31	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum
32	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
33	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
34	Rencana alokasi bersubsidi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat proses penyusunan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
35	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
36	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	1 Tahun	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional
				- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	1 Tahun	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
38	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
40	Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan engganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
42	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Berita sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
44	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
45	Perangkat khusus persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
46	Kunci sistem sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
47	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara

1	2	3	4	5	6
48	Jalur komunikasi VVIP	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Berita/Radiogram rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	5 Tahun	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Membocorkan rahasia negara	- Melindungi rahasia negara
52	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Membocorkan rahasia negara	- Melindungi rahasia negara
53	Hasil Test Kemampuan fisik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang

1	2	3	4	5	6
54	Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olah Raga	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	1 Tahun	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual
55	Mutasi Kepala Sekolah/guru	- Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	1 Tahun	- dapat menimbulkan keresahan	- melindungi rahasia jabatan
56	Penyelesaian kasus perceraian	- PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	1 Tahun	- dapat melanggar hak asasi manusia	- melindungi privasi PNS
57	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

1	2	3	4	5	6
58	Data Debitur dana bergulir	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	- Melindungi rahasia pribadi debitur
59	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	- Melindungi rahasia pribadi sesorang di bidang keuangan
60	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	- Melindungi/menjaga kekayaan alam - Indonesia (sumber daya plasma nutfah)

1	2	3	4	5	6
61	Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	- Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
62	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	- Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
63	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang

1	2	3	4	5	6
65	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)			
66	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
67	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien

1	2	3	4	5	6
68	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
		- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
69	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
70	Hasil audit terkait dengan medical error	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

1	2	3	4	5	6
		- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
71	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14	1 Tahun	- Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui - Oleh pihak yang memiliki kewenangan	- Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
		- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran,Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi			

1	2	3	4	5	6
72	Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	- Melindungi hak pribadi
73	Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	- Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi
74	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	- Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
75	Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap klien	- Melindungi rahasia pribadi calon klien

1	2	3	4	5	6
76	Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/penanganan klien)	- Melindungi rahasia pribadi klien
77	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
78	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
79	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	- UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	1 Tahun	- Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	- Melindungi hak pribadi pengusaha

1	2	3	4	5	6
80	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	1 Tahun	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual
				- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi/mengamankan perangkat serta data
81	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	1 Tahun	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual

1	2	3	4	5	6
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j		- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalah gunaan hak akses	- Menjaga/melindungi hak akses
82	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	1 Tahun	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j		- Dapat menyebakan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	- Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
83	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	1 Tahun	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual

1	2	3	4	5	6
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j			Menjaga keamanan jaringan komputer
84	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
85	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

1	2	3	4	5	6
				- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-
86	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksakan operasi
87	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda)

1	2	3	4	5	6
				- Dapat mengungkap rahasia pribadi - penegak hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
88	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i		- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	

1	2	3	4	5	6
89	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	1 tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum
90	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tanganan barang daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3 - Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah	1 Tahun	- Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	- Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
91	Database Objek Pajak Dan Restribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40	1 Tahun	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi/mengaman k an database objek pajak dan restribusi

1	2	3	4	5	6
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan Pajak			
92	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	1 Tahun	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsipprinsip pengadaan dan etika pengadaan
93	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	1 Tahun	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	- Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
94	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	1 Tahun	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran

1	2	3	4	5	6
95	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	1 Tahun	- Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	- Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
96	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1 Tahun	- Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	- Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
97	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 - UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	1 Tahun	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

1	2	3	4	5	6
98	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	1 Tahun	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
		Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah			

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT